

ANALISIS PENGARUH ANGKA HARAPAN HIDUP, RATA-RATA LAMA SEKOLAH, TINGKAT KEMISKINAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BALI

I Made Cahyadi Putra Kusuma¹

I. K. G Bendesa²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu. Provinsi Bali mempunyai struktur perekonomian yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Keunikan ini disebabkan karena sebagian besar sumber penghidupan masyarakat bersumber dari sektor tersier (pariwisata) sedangkan sektor lainnya hanya berperan sebagai sektor pendukung. Banyak faktor yang mempengaruhi kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemiskinan secara simultan dan parsial terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif bersifat asosiatif yang berlokasi di Provinsi Bali yang mencakup sembilan kabupaten/kota. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dari tahun 2010-2021 di 9 kabupaten/kota sehingga diperoleh jumlah pengamatan 108 pengamatan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemiskinan secara simultan berpengaruh kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, (2) angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan, sedangkan tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, tingkat kemiskinan, kesejahteraan

ABSTRACT

Well-being is an aggregate condition of individual satisfaction. The province of Bali has a very unique economic structure compared to other provinces in Indonesia. This uniqueness is due to the fact that most of the community's sources of livelihood come from the tertiary sector (tourism) while other sectors only act as supporting sectors. Many factors affect the welfare of districts/cities in Bali Province. The purpose of this study was to analyze the effect of life expectancy, average length of schooling, and poverty simultaneously and partially on welfare in districts/cities in Bali Province. This study uses an associative quantitative approach which is located in the province of Bali which covers nine districts/cities. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency of Bali Province from 2010-2021 in 9 districts/cities so that the number of observations is 108 years. The method of data collection in this study is the non-participant observation method. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of the study show that (1) life expectancy, average length of schooling, and poverty level simultaneously affect the welfare of districts/cities in Bali Province, (2) life expectancy and average length of schooling partially have positive and negative effects. significant effect on welfare, while the poverty level partially has a negative and significant effect on welfare in regencies/cities in Bali Province.

Keyword: life expectancy, average length of schooling, poverty, welfare

PENDAHULUAN

Secara sederhana pembangunan dapat dimaknai sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan secara harfiah digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan bangsa yang salah satunya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terlaksananya pembangunan di daerah tercermin dari terwujudnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Suparmoko (2000) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya penerimaan/pendapatan dan pengeluaran/belanja daerah yang secara efektif dapat berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan.

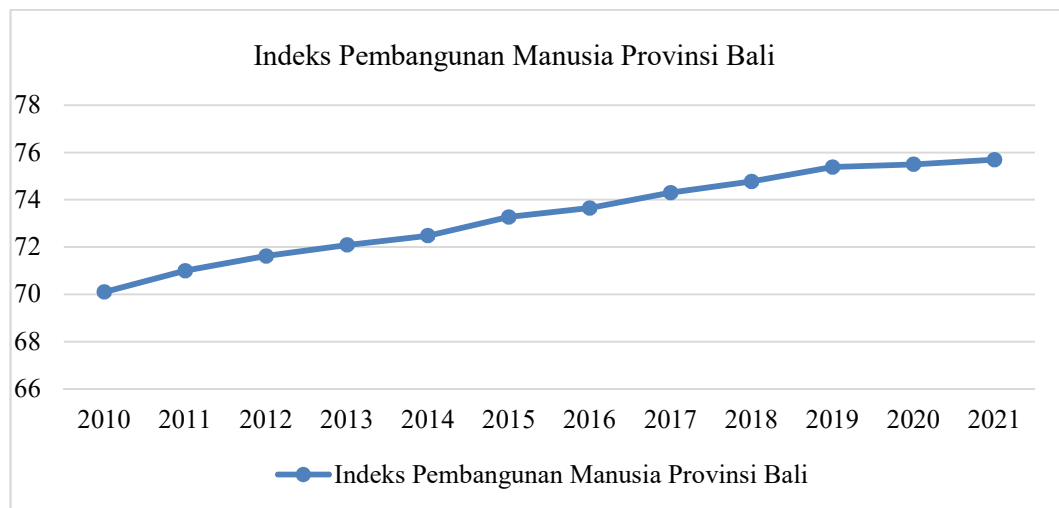
Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu. Kesejahteraan biasanya diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk melihat kondisi sumber daya manusia pada suatu negara. Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, politik dan lingkungan. Oleh sebab itu fokus utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya.

Provinsi Bali mempunyai struktur perekonomian yang sangat unik dibandingkan dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Keunikan ini disebabkan karena sebagian besar sumber penghidupan masyarakat bersumber dari sektor tersier (pariwisata) sedangkan sektor lainnya hanya berperan sebagai sektor pendukung (BPS, 2003). Sumber-sumber dan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah menjadi penentu kemajuan pembangunan di masing-masing wilayah kabupaten/kota tersebut. Kabupaten/kota yang kaya sumber atau potensi ekonomi akan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang lebih cepat dibandingkan kabupaten/kota yang tergolong dalam daerah miskin. Misalnya Kabupaten

Badung yang memiliki potensi lebih besar dalam pengembangan kegiatan pariwisata, Kabupaten Gianyar yang memiliki potensi dalam kegiatan industri kecil, dan Kabupaten Tabanan dalam sektor pertanian. Sementara itu, Kabupaten Karangasem atau Kabupaten Bangli memiliki sumber atau potensi ekonomi yang relatif terbatas sehingga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonominya.

Suliswanto (2010) menyatakan bahwa teori pertumbuhan baru menekankan betapa pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat diperlihatkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan *human development index* tidak hanya didorong oleh pertumbuhan ekonomi sebab pertumbuhan ekonomi merupakan syarat perlu bagi *human development index*, sehingga pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Adanya pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan. Wicaksono (2014) menyatakan bahwa kondisi pemerataan pembangunan yang tercapai akan mendorong akselerasi *human development index*.

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali Pada Tahun 2010-2021



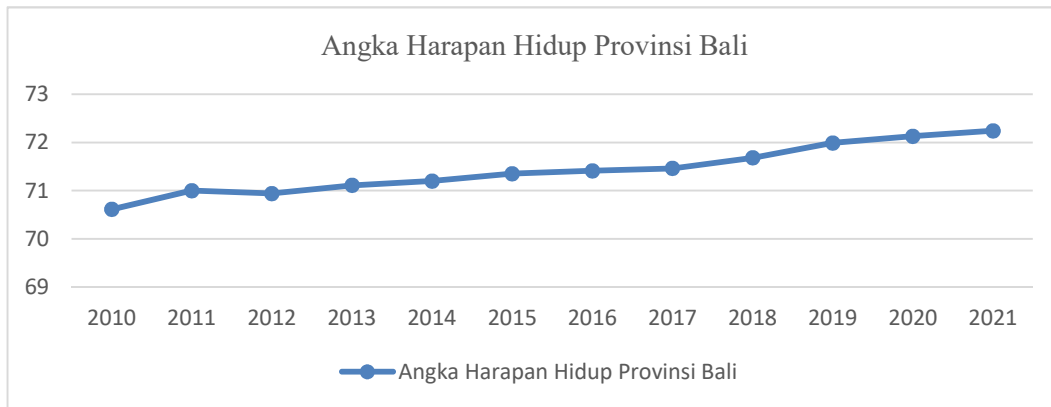
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Secara umum, pembangunan manusia Bali tercatat mengalami kemajuan selama periode 2010 hingga 2021 (BPS, 2022a). IPM Bali tercatat meningkat dari 70,10 pada tahun 2010 menjadi 75,69 pada tahun 2021. Sedangkan kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

masih mengalami disparitas antar kabupaten/kota seperti daerah Bali selatan seperti Kabupaten Badung dan dan Kabupaten Bali Utara yaitu Kabupaten Buleleng. Selama periode tersebut, IPM Bali rata-rata tumbuh sebesar 0,70 poin per tahun dan berada pada level “tinggi”. Jika dilihat selama setahun terakhir, IPM Bali tahun 2021 tumbuh 0,25 poin atau meningkat 0,19 poin dibanding tahun 2020. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pembangunan manusia di Bali tetap berjalan meskipun masih dalam masa pandemi. Data BPS Provinsi Bali (BPS, 2022a) menunjukkan bahwa pada periode tahun kedua pandemi Covid-19, pembangunan manusia di Provinsi Bali menunjukkan arah perbaikan. Hal ini terlihat dari pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Bali tahun 2021 adalah sebesar 75,69 atau tumbuh 0,25 poin (meningkat 0,19 poin) dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Meski mengalami percepatan pertumbuhan secara umum, salah satu komponen pembentuk IPM yakni rata-rata pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tercatat mengalami penurunan pada tahun 2021. Indikator ini turun dari 13,93 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 13,82 juta rupiah pada tahun 2021. Dari sisi pendidikan, pada tahun 2021 anak-anak berusia 7 tahun ke atas memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,40 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan setingkat Diploma I atau semester dua di tingkat universitas. Angka ini meningkat 0,07 tahun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 13,33 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat sebesar 0,11 tahun, dari 8,95 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,06 tahun pada tahun 2021. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 72,24 tahun, lebih lama 0,11 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya.

Gambar 2. Angka Harapan Hidup Provinsi Bali Pada Tahun 2010-2021



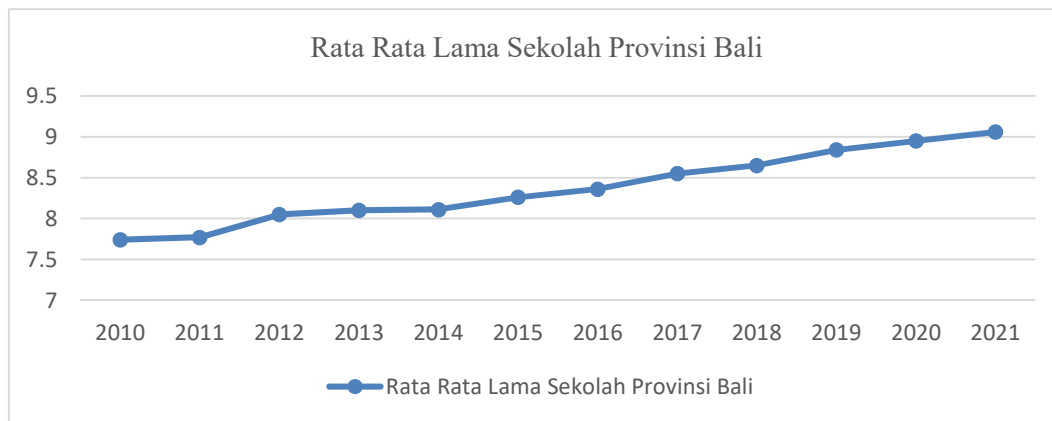
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Angka harapan hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan (<https://sirusa.bps.go.id>). Data BPS Provinsi Bali (BPS, 2022a) menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, UHH telah meningkat sebesar 1,63 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,21 persen per tahun. Tahun 2010, Umur Harapan Hidup saat lahir di Bali adalah 70,61 tahun, dan pada tahun 2021 mencapai 72,24 tahun. Secara umum, Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan umur harapan hidup tertinggi di Provinsi Bali, sedangkan Kabupaten Karangasem dengan umur harapan hidup terendah. Kondisi tersebut terutama disebabkan karena Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi di Provinsi Bali. Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan.

Komponen pembentuk indeks pembangunan manusia lainnya adalah rata-rata lama sekolah. Todaro (2000) menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Yang mana pendidikan memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Pendidikan sangat menentukan kemampuan untuk menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baik dalam kaitannya dengan teknologi sampai kelembagaan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Data BPS Provinsi Bali (BPS, 2022a) menunjukkan bahwa dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2010 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah di Bali tercatat meningkat sebesar 1,69 tahun, sementara Rata-Rata Lama Sekolah tercatat meningkat 1,23 tahun. Secara umum, Kota Denpasar merupakan kabupaten dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Bali, sedangkan Kabupaten Karangasem dengan rata-rata lama sekolah terendah. Kota Denpasar merupakan pusat pemerintahan Provinsi Bali, di mana banyak memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap bila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Bali. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan formal yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

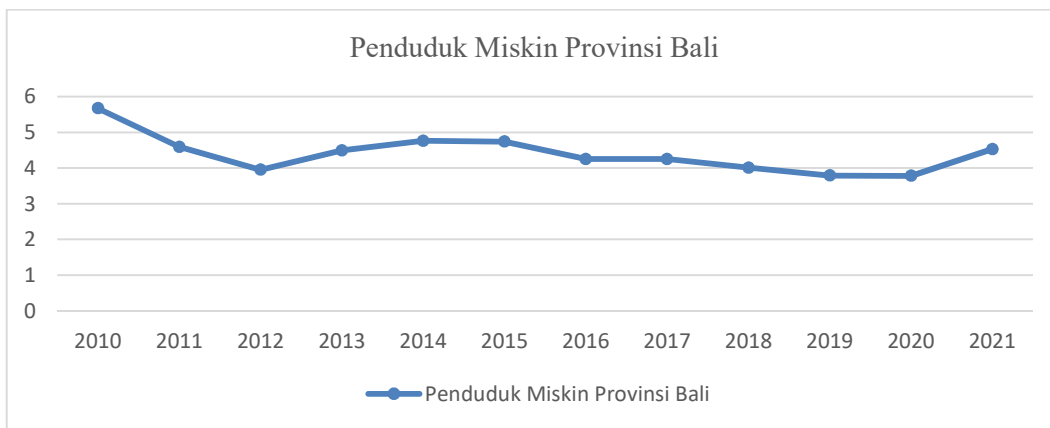
Gambar 3. Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Bali Pada Tahun 2010-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena untuk menanggulangi kemiskinan tersebut masalah yang dihadapi tidak terbatas pada hal-hal yang menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi juga melibatkan preferensi, nilai dan politik. Menurut Todaro dan Smith (2010), di negara-negara berkembang masih banyak ditemukan kemiskinan yang mencolok, meskipun telah terjadi perbaikan-perbaikan yang signifikan selama lebih dari separuh abad terakhir. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*), kurangnya tingkat pendidikan, kecenderungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus, serta bertambahnya pengangguran, yang merupakan faktor terjadinya kemiskinan, di mana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan adanya keterkaitan.

Gambar 4. Penduduk Miskin Provinsi Bali Pada Tahun 2010-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Data BPS Provinsi Bali (BPS, 2022b) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin pada kabupaten/kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Secara umum, Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan penduduk miskin terendah di Provinsi Bali, sedangkan Kabupaten Karangasem dengan penduduk miskin tertinggi. Tingkat penduduk miskin di Provinsi Bali mengalami penurunan setiap tahunnya, terkecuali pada tahun 2013, 2014, dan 2021 secara umum mengalami peningkatan untuk penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Bali pada September 2021 sebesar 4,72 persen, meningkat 0,19 persen terhadap

Maret 2021 dan meningkat 0,27 persen terhadap September 2020. Jumlah penduduk miskin di Bali pada September 2021 sebanyak 211,46 ribu orang, meningkat 9,49 ribu orang terhadap Maret 2021 dan meningkat 14,54 ribu orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 4,33 persen, naik 0,21 persen dari kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 4,12 persen. Sementara persentase penduduk miskin di perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 5,68 persen, naik 0,16 persen jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 5,52 persen. Dibanding Maret 2021, jumlah penduduk miskin Bali pada September 2021 di daerah perkotaan naik sebanyak 8 ribu orang (dari 129,58 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 137,60 ribu orang pada September 2021). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin Bali di perdesaan naik sebanyak 1,5 ribu orang (dari 72,39 ribu orang pada Maret 2021 menjadi 73,86 ribu orang pada September 2021).

Garis Kemiskinan pada bulan September 2021 tercatat sebesar Rp 461.532,- per kapita per bulan, yang terdiri dari daerah perkotaan sebesar Rp 474.322,- per kapita per bulan dan daerah perdesaan sebesar Rp 429.877,- per kapita per bulan. Dibandingkan kondisi Maret 2021, nilai tersebut naik sebesar 2,06 persen, sementara jika dibandingkan September 2020, terjadi kenaikan sebesar 5,33 persen (BPS, 2022b). Garis kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan sebagai rumah tangga miskin. Secara rata-rata, garis kemiskinan per rumah tangga di Bali pada September 2021 tercatat sebesar Rp2.261.507,-/bulan naik sebesar 5,50 persen dibanding kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar Rp2.143.528,-/bulan (BPS, 2022b).

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan dalam melihat indikator kemiskinan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, 2022b). Pada periode Maret–September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P_2) mengalami kenaikan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar 0,759 naik 0,077 poin dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,682, jika dibandingkan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,610, nilai ini naik 0,149 poin. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami kenaikan 0,068 poin dari 0,154 pada Maret 2021 menjadi 0,171 pada September 2021.

Jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,103, nilai ini naik sebesar 0,061 poin. Jika dibandingkan menurut daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2021, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,710, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 0,878. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) di perkotaan tercatat sebesar 0,148, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 0,226.

Indikator lain yang disertakan mendampingi indikator kemiskinan adalah ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk (BPS, 2022c). Salah satu ukuran ketimpangan yang digunakan adalah Indeks Gini Ratio. Nilai indeks gini ratio berkisar antara 0 - 1. Semakin tinggi nilai indeks gini ratio menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sepanjang periode September 2014 hingga September 2021 tercatat indeks Gini Ratio Provinsi Bali cenderung berfluktuasi, indeks Gini Ratio tertinggi tercatat sebesar 0,442 pada September 2014, dan terendah tercatat sebesar 0,364 pada September 2018. Kondisi September 2021, indeks Gini Ratio Provinsi Bali tercatat sebesar 0,375 mengalami penurunan sebesar 0,003 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,378. Hal ini mengisyaratkan adanya perbaikan pemerataan pendapatan di Bali.

Data BPS Provinsi Bali (BPS, 2022c) menunjukkan bahwa pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Bali yang diukur dengan menggunakan Gini Ratio tercatat sebesar 0,375. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,378 dan meningkat 0,006 poin dibandingkan dengan kondisi September 2021 yang tercatat sebesar 0,369. Gini Ratio Bali di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,379. Capaian ini turun -0,008 poin jika dibandingkan kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,387 dan naik sebesar 0,001 poin. Jika dibandingkan dengan kondisi

September 2020 yang tercatat sebesar 0,378. Gini Ratio Bali di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,302. Capaian ini naik jika dibanding kondisi Maret 2021 yang tercatat sebesar 0,301 dan turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2020 yang tercatat sebesar 0,304. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran Bali pada September 2021 untuk kelompok 40 persen terbawah tercatat sebesar 18,04 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk Bali pada September 2021 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 17,60 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Begitu juga untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 21,35 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan PDB semata, melainkan juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang (Todaro, 2000). Ada hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Sebagian besar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang sangat miskin (Arsyad, 1997). Data BPS Provinsi Bali (BPS, 2022d) menunjukkan jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 2,58 juta orang, meningkat 12,60 ribu orang dibandingkan Agustus 2020. Namun pada periode yang sama, TPAK mengalami penurunan sebesar 0,78 persen menjadi 73,54% pada Agustus 2021. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021 sebesar 5,37%, menurun 0,25 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Namun TPT tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan TPT Bali sebelum pandemi Covid-19 pada Februari 2020 yang tercatat sebesar 1,25%. Pada Agustus 2021, jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 2,44 juta orang, meningkat 18,44 ribu orang dibandingkan kondisi Agustus 2020.

Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,90 persen) (BPS, 2022d). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (-0,61 persen). Sebanyak 139,42 ribu orang (57,10%) bekerja pada kegiatan informal, meningkat 0,40 persen dibanding Agustus 2020. Dibandingkan dengan Agustus 2020,

persentase setengah penganggur turun sebesar 0,09 persen, sementara persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 5,42 persen. Terdapat 714,21 ribu orang (20,35%) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 di Provinsi Bali. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (48,89 ribu orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (33,41 ribu orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (38,15 ribu orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (593,75 ribu orang).

Berdasarkan BPS Provinsi Bali (BPS, 2022b), beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Bali selama periode Maret–September 2021 antara lain: (1) Terjadi gelombang kedua pandemi Covid-19 di Bali. (2) Pertumbuhan ekonomi Bali triwulan III 2021 berkontraksi sedalam -2,91 persen. Capaian ini sedikit lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi triwulan I 2021 (y-on-y) yang tercatat berkontraksi -9,78 persen. Pertumbuhan ekonomi Bali negatif pada triwulan III 2021 menggambarkan kondisi masyarakat Bali masih kesulitan dari sisi ekonomi. (3) Pertumbuhan kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman, turun -8,47 persen, kategori lapangan usaha industri pengolahan turun -7,27 persen, dan yang mengalami penurunan tertinggi adalah transportasi dan pergudangan turun -16,03 persen. Lapangan usaha tersebut menjadi salah satu penampung tenaga kerja di Bali. Penurunan pertumbuhan tersebut sejalan dengan penurunan tenaga kerja formal pada Agustus 2021 yang berdampak pada pengurangan pendapatan rumah tangga. (4) Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2021 berkontraksi sebesar -1,09 persen (y-on-y). Capaian ini lebih baik jika dibandingkan kondisi triwulan I 2021 yang tercatat berkontraksi sedalam -3,73 persen (y-on-y). Kondisi ini mengindikasikan masih belum pulihnya dalam pemenuhan konsumsi rumah tangga (5) Inflasi Kota Denpasar kondisi September 2021 tercatat sebesar 0,19. Inflasi kumulatif Maret-September 2021 tercatat deflasi sebesar -0,43. Hal ini menggambarkan daya beli masyarakat yang belum membaik. (6) Pada Agustus 2021 tercatat sebanyak 67,97 ribu orang pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja akibat terdampak Covid-19. Pengurangan jam kerja berimplikasi pada turunnya pendapatan. (7) Pekerja informal di Bali mengalami kenaikan pada kondisi Agustus 2021 jika dibandingkan kondisi Februari 2021. Dilihat dari status kedudukan dalam bekerja, pekerja keluarga mengalami kenaikan paling tinggi. (8) NTP kondisi September 2021 tercatat sebesar 93,00, ini masih di bawah 100 artinya

pendapatan yang diterima petani lebih rendah dari biaya yang dibayarkan petani, atau kata lain petani masih merugi. (9) Susenas September 2021 mencatat terjadi peningkatan bantuan PKH jika dibandingkan kondisi Maret 2021, akan tetapi jika dilihat bantuan pangan yang menjadi tumpuan masyarakat miskin untuk bertahan hidup mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2021. Berdasarkan perbedaan harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, maka penulis tertarik untuk meneliti variabel tersebut sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan. Angka harapan hidup sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dipertegas oleh hasil penelitian Masruroh dan Subekti (2016) menyatakan bahwa angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil penelitian Keman (2020) menyatakan bahwa angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Asmawani dan Pangidoan (2021) menyatakan bahwa angka harapan hidup (AHH) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2021) menyatakan bahwa angka harapan hidup secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Todaro (2000) menyatakan bahwa tingkat penghasilan sangat dipengaruhi oleh lamanya seseorang memperoleh pendidikan. Rata-rata lama sekolah merupakan indikator tingkat pendidikan di suatu daerah. Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk dapat memaksimalkan selisih antara keuntungan yang diharapkan dengan biaya-biaya yang diperkirakan, maka strategi optimal bagi seseorang adalah berusaha menyelesaikan pendidikan setinggi mungkin. Investasi dalam modal manusia akan terlihat lebih tinggi manfaatnya apabila dibandingkan antara total biaya pendidikan yang dikeluarkan selama menjalani pendidikan terhadap pendapatan yang nantinya akan diperoleh ketika mereka sudah siap bekerja. Orang-

orang yang berpendidikan tinggi akan memulai kerja penuh waktunya pada usia yang lebih tua, namun pendapatan mereka akan cepat naik dari pada orang yang bekerja lebih awal (Todaro, 2000). Dengan demikian rata-rata lama sekolah merupakan salah satu factor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, pernyataan tersebut dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2018) menyatakan bahwa angka rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Fajri (2021) juga menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Asmawani dan Pangidoan (2021), juga menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Manurung dan Hutabarat (2021), menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia.

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Bappenas, 2004); (Chalid & Yusuf, 2014). Penelitian Muliza *et al.* (2017) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, maka dengan menurunnya tingkat kemiskinan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Penelitian Adelfina dan Jember (2016) yang menyatakan bahwa secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Berbeda dengan hasil penelitian Zamharir (2016) yang menyatakan bahwa kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *human development index*. Hasil penelitian Utama *et al.* (2015) menunjukkan bahwa kemiskinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Penelitian ini dilakukan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali menggunakan 108 titik pengamatan dengan pertimbangan terjadinya disparitas (perbedaan) pada angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Penelitian ini menggunakan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Penelitian ini memfokuskan kajian pada empat variabel utama yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan. Variabel *Independent* merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat), dalam penelitian ini yang menjadi variabel angka harapan hidup (X_1), rata-rata lama sekolah (X_2), dan tingkat kemiskinan (X_3). Variabel *Dependent* merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini yang menjadi variabel *dependent* adalah kesejahteraan (Y). Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali terkait data angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, tingkat kemiskinan, dan kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Bali yakni terdiri dari delapan (8) kabupaten dan satu (1) kota dalam kurun waktu 12 tahun yakni dari tahun 2010-2021. Jadi jumlah titik pengamatan adalah 108 titik pengamatan, yang merupakan gabungan antara data deret waktu (*time series*) dengan jumlah kabupaten/kota. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda panel data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dari analisis data panel menentukan apakah model yang digunakan menganut *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Regresi data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section* (Effendi dan Setiawan, 2013:115). Agar model yang digunakan baik dan sesuai, diperlukan Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan adalah *common effect* atau *fixed effect*. Hasil Uji Chow ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	45.839916	(8,96)	0.0000
Cross-section Chi-square	169.859428	8	0.0000

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh nilai probabilitas sebesar $0.000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka model yang dipilih adalah *fixed effect* model. Selanjutnya yaitu uji Hausman yang dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan adalah *fixed effect* atau *random effect*.

Tabel 2. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.925042	3	0.2697

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2 diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,269 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut maka model yang dipilih adalah *random effect* model. Selanjutnya dilakukan uji Spesifikasi Model dengan Uji *Langrange Multiple* (LM) untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan metode *random effect* atau *common effect*. Hasil Uji Hausman ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji *Langrange Multiple* (LM)

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	297.0669 (0.0000)	2.724118 (0.0988)	299.7911 (0.0000)
Honda	17.23563 (0.0000)	1.650490 (0.0494)	13.35450 (0.0000)
King-Wu	17.23563 (0.0000)	1.650490 (0.0494)	14.18533 (0.0000)
GHM	-- --	-- --	299.7911 (0.0000)

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Berdasarkan hasil tersebut maka model yang dipilih adalah *random effect* model. Berdasarkan hasil dari penentuan model yang dipilih antara *Common Effect*, *Fixed Effect* dan *Random Effect* dengan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji *Langrange Multiple* (LM) dapat disimpulkan bahwa model yang dipilih adalah model *random effect* yang menentukan *Ordinary Least Squared* (OLS) layak untuk digunakan.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan tingkat kemiskinan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-47.24029	10.07023	-4.691084	0.0000
X1	1.453679	0.158499	9.171516	0.0000
X2	2.030766	0.193688	10.48474	0.0000
X3	-0.183156	0.068280	-2.682437	0.0085
R-squared	0.965614			
Adjusted R-squared	0.964623			
S.E. of regression	0.387545			
F-statistic	973.5089			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh persamaan regresi yaitu:

$$Y = -47,240 + 1,454X_1 + 2,031X_2 - 0,183X_3$$

Dimana :

Y = Kesejahteraan

X₁ = Angka harapan hidup

X₂ = Rata-rata lama sekolah

X₃ = Tingkat kemiskinan

Tabel 4. menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar -47,240 yang berarti bahwa apabila angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemiskinan konstan maka kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali akan menurun sebesar -47,240 poin. Angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan koefisien 1,454 dan signifikan pada 0,000 < 0,05. *Standardized Coefficient* variabel rata-rata lama sekolah yaitu 2,031 dengan tingkat signifikan pada 0,000 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Variabel tingkat kemiskinan memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan koefisien 0,183 dan tingkat signifikansi 0,008 < 0,05. Secara simultan variabel angka harapan hidup, rata-rata lama

sekolah dan tingkat kemiskinan berpengaruh nyata terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali pada *level of significant* 5 persen, hal ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ini berarti bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Tabel 4 juga menunjukkan bahwa koefisien determinasi total *R-squared* yaitu 0,965, memiliki arti bahwa 96,5 persen variasi dari kesejahteraan mampu dijelaskan oleh variasi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan tingkat kemiskinan, sedangkan 3,5 persen lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model seperti distribusi pendapatan, jenis pekerjaan, dan tingkat kesehatan.

1) Pengaruh angka harapan hidup terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel angka harapan hidup sebesar 1,454 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa apabila angka harapan hidup meningkat sebesar 1 tahun maka kesejahteraan juga akan meningkat sebesar 1,454 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besarnya angka harapan hidup memberikan pengaruh yang positif terhadap nilai kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, dimana ketika angka harapan hidup meningkat maka kesejahteraan akan meningkat.

Peningkatan kesejahteraan sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Seseorang yang memiliki usia panjang tentu saja diakibatkan oleh tercukupinya gizi sehingga berada dalam kondisi sehat. Hal ini tidak terlepas dari pendapatannya yang mampu memenuhi kebutuhannya terkait konsumsi, kesehatan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan. Hal inilah yang menunjang seseorang berada pada kondisi sejahtera karena memiliki usia yang panjang. Penelitian Asmawani dan Pangidoan (2021) menyatakan bahwa angka harapan hidup (AHH) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Karena tingginya angka harapan hidup menunjukkan keberhasilan pemerintah

dalam melakukan pembangunan kesehatan sehingga berdampak pada peningkatan pembangunan manusia. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Masrurroh dan Subekti (2016) menyatakan bahwa angka harapan hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil penelitian Keman (2020) juga menyatakan bahwa angka harapan hidup berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

2) Pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh koefisien variabel rata-rata lama sekolah sebesar 2,031 dengan tingkat signifikan 0,000 lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan yaitu 0,05. Hal ini berarti bahwa apabila rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 1 tahun maka kesejahteraan juga akan meningkat sebesar 2,031 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa ketika rata-rata lama sekolah meningkat maka kesejahteraan akan meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arofah & Rohimah (2019) dan penelitian Manurung & Hutabarat (2021) yang menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Astuti (2018) menyatakan bahwa angka rata-rata lama sekolah berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Ketika semakin lama seseorang mendapatkan pendidikan formal maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat sehingga ketika bekerja akan lebih optimal untuk menghasilkan output. Pada saat output yang dihasilkan meningkat maka pendapatan akan meningkat juga sehingga dapat berkonsumsi lebih banyak yang akan berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang ada. Sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka indeks pembangunan manusia akan meningkat pula. Fajri (2021) juga menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Asmawani dan Pangidoan (2021), juga menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

3) Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh nilai koefisien variabel tingkat kemiskinan sebesar $-0,183$ dengan tingkat signifikan $0,008$ lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan yaitu $0,05$. Hal ini berarti bahwa apabila tingkat kemiskinan meningkat sebesar 1 persen maka kesejahteraan akan menurun sebesar $0,183$ poin dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besarnya tingkat kemiskinan memberikan pengaruh yang negatif terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, dimana ketika tingkat kemiskinan meningkat maka kesejahteraan akan menurun.

Tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan namun negatif terhadap kesejahteraan, dalam hal ini kemiskinan sangat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia jika kemiskinan meningkat maka akan mengakibatkan indeks pembangunan manusia turun. Lingkaran kemiskinan terdapat tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli yang tidak mampu dicapai penduduk miskin dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan maka akan mempengaruhi rendahnya kualitas sumber daya manusia. Penelitian Mulia (2022) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat, hal disebabkan karena penduduk miskin menggunakan pendapatannya untuk kebutuhan makanan sehingga penduduk miskin merasa konsumsinya cukup dan sejahtera walaupun kebutuhan kesehatan dan pendidikannya tidak terpenuhi. Hal yang memicu penduduk miskin merasa sejahtera yaitu kondisi rumah tangganya yang rukun, tenang, dan damai. Rumah tangga yang memiliki kondisi rumah tanpa masalah akan merasa sejahtera, sehingga tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suharlina (2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, dikarenakan daerah tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan sehingga akan berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia. Produktivitas kerja meningkat maka akan meningkatkan pendapatan sehingga akan

berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian Maulana, dkk (2022) menyatakan bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2107.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan yaitu angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan tingkat kemiskinan secara simultan berpengaruh terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan. Tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Upaya-upaya terkait pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 harus terus dilakukan agar masyarakat dapat hidup sejahtera tanpa khawatir akan pandemi yang mengganggu perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan memulai mengembangkan diri agar dapat memanfaatkan peluang-peluang kecil yang ada sehingga mampu membangkitkan perekonomian. Selain itu upaya yang dapat dilakukan yaitu memberikan sosialisasi minimal melalui sosial media mengenai pentingnya meningkatkan gaya hidup sehat serta vaksin lengkap untuk meminimalisir terinfeksi Covid-19. Hal ini juga dapat dilakukan Tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali masih sangat timpang. Distribusi pembangunan belum merata ke seluruh daerah di Provinsi Bali. Daerah yang tidak berada di sekitar pusat administrasi kota belum merasakan pembangunan yang merata di aspek Indeks Pembangunan Manusia, sehingga pemerataan kondisi ekonomi harus di tingkatkan untuk meningkatkan pembangunan sehingga pilihan masyarakat untuk kehidupan lebih beragam. Hal ini dapat dilakukan dengan memulai membangun fasilitas-fasilitas kecil di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota sehingga mereka juga dapat menikmati fasilitas seperti di pusat kota. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang bisa mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Variabel yang dimaksud yaitu distribusi pendapatan, jenis pekerjaan, dan tingkat kesehatan.

REFERENSI

- Adelfina dan Jember, I Made. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. 5(10): 1011-1025. ISSN: 2303-0178
- Albert, M. & Hahnel, R. (2005). *Traditional Welfare Theory*, www.zmag.org/books/1/html (diakses: 30-8-2021).
- Arofah, I., & Rohimah, S. (2019). Analisis Jalur Untuk Pengaruh Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pengeluaran Riil Per Kapita Di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Sainika Unpam: Jurnal Sains Dan Matematika Unpam*, 2(1), 76
- Arsyad, L. (1997). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN
- Asmawani, dan Pangidoan, D. (2021). Pengaruh Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Samosir serta Serdang Berdagai. *Jurnal Sains Ekonomi*, 2(1), 96–109.
- Astuti, Maulida. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2003). *Provinsi Bali Dalam Angka*. Provinsi Bali: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. 2022a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bali Tahun 2021. *Berita Resmi Statistik (BRS)*. No. 75/12/51/Th. VI, 1 Desember 2021
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. 2022b. Profil Kemiskinan Bali September 2021. *Berita Resmi Statistik (BRS)*. No. 06/01/51/Th. XVI, 17 Januari 2022
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. 2022c. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Bali, September 2021. *Berita Resmi Statistik (BRS)*. No. 07/01/51/Th. I, 17 Januari 2022
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. 2022d. Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Bali Agustus 2021. *Berita Resmi Statistik (BRS)*. No. 68/11/51/Th. XV, 5 November 2021
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. 2022e. *Tabel Dinamis Subjek Indeks Pembangunan Manusia*. Provinsi Bali: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. 2022f. *Tabel Dinamis Subjek Kemiskinan dan Ketimpangan*. Provinsi Bali: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. 2022g. *Tabel Dinamis Subjek Tenaga Kerja*. Provinsi Bali: Badan Pusat Statistik
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun. (2010). Laporan Akhir Evaluasi Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Prasejahtera/Kps dan Keluarga Sejahtera–I/Ks-I. diakses dari https://www.bappenas.go.id/_files/_3513/_4986/_1937/_laporanakhir-evaluasi-28-jan1__20110512124617__1.pdf, pada 11 April 2022
- Badrudin, Rudy. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Chalid, Nursiah dan Yusuf, Yusbar. (2014). Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*. 22(2). e-ISSN: 2715-6877
- Dajan, Anto. (1986). *Pengantar Metode Statistik II*. Jakarta: Penerbit LP3ES
- Fajri, Rahmat Hafizatul. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), Hlm. 212-222, September 2021
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (8 ed.)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar dan Zain. (1999). *Ekonometrika Dasar*. Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga
- Jarnasy, Owin. (2004). *Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika
- Keman, Rizka Sakinah. (2020). Pemodelan Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau Dengan Menggunakan Metode Spatial Autoregressive. *Skripsi*. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Kuncoro, Mudrajat. (2006). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Liony Wijayanti, Ihsannudin. (2013). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Agriekonomika*
- Manurung, Erly Nofriyanti dan Hutabarat, Francis. (2021). Pengaruh Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, Pengeluaran per Kapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 4(2), Hal:121-129, November 2021, P-ISSN: 2598-0696, E-ISSN: 2684-9283
- Masruroh, Marwah dan Subekti, Retno. (2016). Aplikasi Regresi Partial Least Square Untuk Analisis Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Yogyakarta. *Media Statistika*. 9(2). 2016: 75-84. p-ISSN: 1979 – 3693, e-ISSN: 2477 – 0647
- Maulana, Rivo., Agus Joko Pitoyo., Muhammad Arif Fahrudin Alfana. 2022. Analisis Pengaruh Kemiskinan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. *Media Komunikasi Geografi Undiksha*, Vol. 22, No. 1, pp: 12-24
- Mulia, Rizky Afri. 2022. Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*. Vol 2 No 1 pp: 22-33
- Muliza., T. Zulham., Seftarita, Chenny. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB Terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Vol. 3(1)
- Nugroho, Widiatma. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Agrishare, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia. Semarang: *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Sodiq, Amirus. (2015). Konsep Kesejahteraan dalam Islam. *Jurnal Equilibrium*. Vol 3 No 2 pp: 380-405
- Stiglitz, Joseph E. (2011). *Mengukur Kesejahteraan*. Bintaro: PT Wahana Aksi Kritika

- Sugiyono. (2012). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Suharlina, Helly. 2020. Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 5 No 7 pp: 56-72
- Suharto. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial)*, Bandung: PT.Refika Aditama
- Suliswanto, Muhammad Sri W. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 8(2)
- Suparmoko, M. (2000). *Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek (V ed.)*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Suyana Utama, Made. (2016). *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: CV Sastra Utama
- Suryawati, Chriswardani. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JMPK*, 8(3), hal. 121-129.
- Suryawati. (2014). *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Bandung: Alfabeta.
- Theresia, Tessa. (2017). Pengaruh PDRB Perkapita, Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Lampung. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Todaro, Michael P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Todaro, Michael P. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi (edisi kesembilan, jilid I)*. Jakarta : Erlangga
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2010). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Utama, Septian Jefri Alif., Priyono, Teguh Hadi., dan Yuliati, Lilis. (2015). Pengaruh Pdrb, Belanja Modal Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus: Eks Karesidenan Besuki). *Artikel Ilmiah Mahasiswa*. Universitas Negeri Jember
- Wicaksono, Muhammad Nur. (2014). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Angkatan Kerja, dan Belanja Modal Daerah Terhadap Peningkatan PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Universitas Brawijaya. 3(1)
- Widyastuti, Astriana. (2012). Analisis Hubungan Antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Jawa Tengah Tahun 2009. *Economics Development Analysis Journal*, Vol 1 No 1 pp: 1-11
- Zamharir, Amirul. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, PDRB Per Kapita, dan Upah Minimum Terhadap Human Development Index: Studi Kasus 12 Provinsi Dengan Kategori Lower Medium Di Indonesia. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga